

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Diguyur Dana Bos Rp 161 Miliar
Entitas / Cakupan	: BPK
Sumber / Hal	: Galamedia/Hal.13
Edisi	: Rabu, 28 Maret 2018

Diguyur Dana BOS Rp 161 Miliar

■ KBB Harus Hindari Temuan BPK

NGAMPRAH, (GM).-

Seluruh kepala sekolah dan bendahara sekolah dasar negeri (SDN) di Kabupaten Bandung Barat, diharapkan dapat bertanggung jawabkan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Hal itu dilakukan untuk menghindari temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala Bidang SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Jalaludin mengungkapkan, tahun ini dana BOS yang disalurkan mencapai Rp 161 miliar untuk 672 sekolah negeri. Sementara, dengan adanya bantuan BOS ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan bagi seluruh siswa.

"Kita ingin mewujudkan pengelolaan keuangan BOS yang tertib, efektif, efisien,

transparan dan bertanggung jawab. Harapannya tentu tidak menjadi temuan dari BPK," katanya saat ditemui di SDN Sudimampir Padalarang, Senin (26/3).

Dikatakan Jalaludin, saat ini pihaknya pun terus memberikan pembinaan dan arahan soal penggunaan dana bantuan BOS tersebut.

Menurutnya, sejak 2017 lalu sistem laporan penggunaan dana BOS harus mengikuti sistem laporan keuangan pemerintah daerah. Hal itu mengacu pada Surat Edaran Mendagri Nomor 910/106/SJ tahun 2017 tentang Juknis Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan serta Pertanggung jawaban dana BOS.

"Kita sudah melakukan sejak tahun lalu sistem tersebut. Namun intinya, sekarang

kita ingin memberikan pembinaan dan arahan soal penggunaan dana bos ini," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dana BOS merupakan dana yang ditransfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi, yang penyalurannya dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi. Dana BOS yang sudah tersalurkan di RKUD provinsi selanjutnya disalurkan secara langsung ke masing-masing rekening sekolah.

"Kami itu hanya mencatatkan saja soal dana bos ini, sementara anggarannya langsung ditransferkan ke masing-masing sekolah," katanya.

Temuan BPK

Seperti diketahui, untuk tahun anggaran

2016 seperti di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan serta Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi persoalan temuan oleh BPK. Meski demikian, temuan dari BPK tersebut langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Selain itu, perbaikan pun sudah disampaikan kepada BPK untuk tahun anggaran 2016 lalu.

"Seperti temuan dana Bos, piutang PBB termasuk soal aset dan sudah kita perbaiki sesuai arahan dari BPK. Yang terpenting buat kami sudah menyajikan laporan semaksimal mungkin," ujar Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat, Asep Sodikin, belum lama ini. (amr)**